

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pembangunan Ekonomi

Pembangunan adalah manifestasi dari suatu proses menuju kemajuan material perekonomian, sehingga ukuran-ukuran keberhasilannya dapat terlihat dari besaran indikator ekonomi seperti pertumbuhan GDP, pertumbuhan PDRB, proses akumulasi modal untuk investasi, dan tingkat konsumsi masyarakat. Dengan karakteristik semacam itu, negara-negara berlomba menggapai kemakmuran ekonomi lewat serangkaian penyelenggaraan pembangunan secara sistematis, dengan tujuan utama memuaskan masyarakat (individu) secara material. Filsafat pembangunan seperti ini sering disebut dengan istilah “*fordisme*”, yang merujuk kepada upaya terciptanya masyarakat dunia yang makmur berdasarkan maksimisasi kegunaan tanpa batas, yang dibentuk melalui tiga elemen penting, yaitu rasionalitas, efisiensi, dan produksi/konsumsi massal (A. Erani Yustika, 2002 : 49).

Langkah-langkah pembangunan ekonomi sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap-sikap yang sadar terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk percepatan / akselerasi

pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut (M.P.Todaro 1993 : 124). Dengan demikian pembangunan ekonomi merupakan usaha suatu masyarakat untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, sedangkan usaha-usaha pembangunan secara keseluruhan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan tersebut maka pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 1985 : 13).

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pembangunan ekonomi meliputi tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan :

1. Suatu proses, yang berarti perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
2. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan
3. Kenaikan pendapatan per kapita itu harus berlaku dalam jangka panjang.

Di dalam analisis, pembangunan ekonomi perlu dipandang sebagai suatu proses yang saling berkaitan, berhubungan dan saling mempengaruhi antara faktor-faktor yang menghasilkan pembangunan itu sendiri. Sehingga pada akhirnya hasil dari pembangunan ekonomi tersebut dapat dilihat.

H.F.Wilamson mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses, dimana suatu negara dapat menggunakan sumber-sumber daya produksinya sedemikian rupa, sehingga dapat memperbesar produk per kapita negara tersebut (Winardi, 1983 :4).

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu usaha dan proses yang menyebabkan perubahan dari ciri-ciri penting dalam masyarakat, yaitu perubahan dalam keadaan sistem politik, struktur sosial, nilai-nilai masyarakat dan struktur kegiatan ekonomi (Sadono Sukirno, 1985 : 103).

Selain itu pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbesar pendapatan per kapita dan meningkatkan produksi dengan jalan menambah peralatan modal serta meningkatkan keahlian. Ukuran untuk suatu kemajuan tidak hanya pendapatan per kapitanya melainkan juga produktifitasnya (Sumitro Djojohadikusumo, 1985 :39).

Pendapat para ahli mengatakan pembangunan ekonomi sebagai :

1. Peningkatan dalam pendapatan per kapita masyarakat, yaitu tingkat pertumbuhan GDP suatu tahun tertentu melebihi dari tingkat pertambahan penduduk.
2. Perkembangan GDP yang berlaku dalam suatu masyarakat yang dibarengi dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonominya, yang pada umumnya masih bercorak tradisional (Sadono Sukirno, 1985 : 14).

Pembangunan ekonomi bukan saja berarti perombakan dalam corak kegiatan ekonomi masyarakat tetapi juga merupakan perombakan dalam sikap masyarakat dan berbagai aspek dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat lainnya.

Syarat utama pembangunan ekonomi adalah bahwa proses pertumbuhan harus bertumpu pada kemampuan perekonomian di dalam negeri untuk memperbaiki nasib dan prakarsa. Untuk menciptakan kemajuan material harus diprakarsai oleh yang bersangkutan dan tidak dapat digabungkan dari luar, kekuatan ini sebaiknya

tidak hanya untuk merangsang atau membantu kekuatan nasional. Bantuan ini hanya bersifat mengawali atau merangsang perubahan dan tidak bersifat mempertahankan (M.L.Jhingan, 1999 : 41).

2. Pengertian Ketimpangan Pendapatan

Kesenjangan pendapatan dapat diartikan sebagai perbedaan kemakmuran ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin. Hal ini tercermin dari perbedaan pendapatan (Robert E Baldwin, 1986 : 16).

Masalah kesenjangan pendapatan sering juga diikhtisarkan, bahwa pendapatan riil dari yang kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang.

Ini berarti bahwa pendapatan riil dari yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin (Bruce Herrick/Charles P Kindleberger, 1988 : 171).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesenjangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibat dari perbedaan itu maka akan terlihat kesenjangan yaitu yang kaya akan semakin kaya dan sebaliknya yang miskin akan semakin terpuruk.

Menurut Myrdall, ketimpangan pendapatan terjadi karena kuatnya dampak balik dan lemahnya dampak sebar di negara-negara berkembang (M.L.Jhingan, 1999 : 212).

Apabila kita menganalisa faktor-faktor yang menentukan tentang pemerataan penghasilan yang timpang adalah pemerataan kekayaan atau harta yang produktif

dan menghasilkan seperti tanah dan modal dalam segmen-segmen yang berbeda dalam masyarakat dunia ketiga yang pada umumnya menyebabkan perbedaan penghasilan yang besar sekali antara yang kaya dan miskin atau antara golongan dan lapisan masyarakat.

Menurut Parvez Hasan, ketimpangan pendapatan dapat menyebabkan kesempatan untuk memperoleh atau memenuhi kebutuhan pokok semakin kecil (Bintoro, 1986 : 88).

Indikator untuk mengetahui ketimpangan dan kesenjangan pendapatan dapat dilakukan dengan :

1. Kurva Lorenz

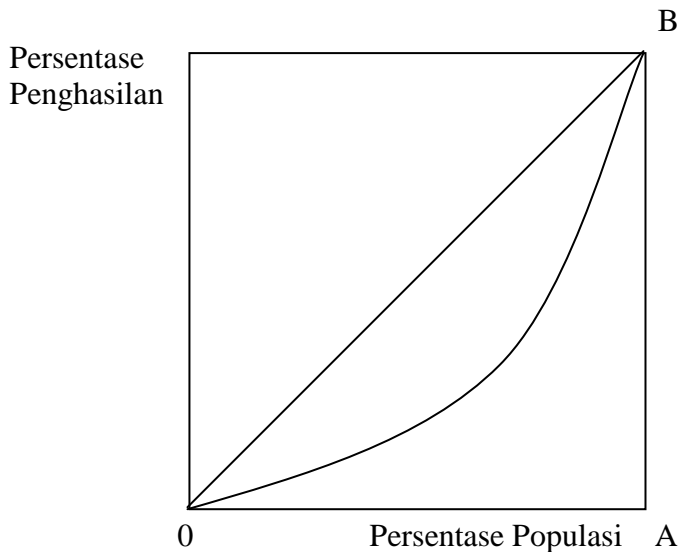
Cara umum yang lain melihat penghasilan pribadi adalah dengan membuat apa yang dinamakan dengan Kurva Lorenz.

Pada Gambar 1 diperlihatkan bagaimana cara membuat Kurva Lorenz.

Jumlah penerimaan penghasilan ditempatkan diatas sumbu horizontal sedangkan sumbu vertikal menggambarkan bagian jumlah penghasilan yang diterima oleh masing-masing persentase populasi. Kedua sumbu tersebut dikombinasikan sampai dengan 100 persen. Dengan demikian kedua sumbu tersebut sama panjang dan semua angka ditempatkan dalam bujur sangkar.

Pada garis diagonal, yang merupakan garis persamaan digambarkan dari sudut bawah sebelah kiri bujur sangkar menuju kearah sebelah kanan pada sudut atas Kurva Lorenz tersebut.

Gambar 1. Kurva Lorenz



Sumber : M.P. Todaro, 1993:196

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif yang aktual antara persentase-persentase penerimaan penghasilan yang mereka terima sebenarnya. Semakin jauh Kurva Lorenz dari garis diagonal berarti semakin besar pula ketimpangan pendapatan yang terjadi, dan sebaliknya semakin dekat Kurva Lorenz dengan garis diagonal maka akan semakin kecil tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi.

2. Koefisien Gini

Pada Gambar 2 berikut ini adalah rasio area A yang diberi arsiran dibandingkan dengan jumlah area segitiga ABC. Rasio ini dikenal dengan nama Rasio Koefisien Gini atau Koefisien Gini. Nama Koefisien Gini diambil dari nama seorang ahli statistik Italia yaitu C. Gini, orang pertama yang memformulasikan hal tersebut pada tahun 1912.

Pengukuran tingkat ketimpangan dengan menggunakan Koefisien Gini diformulasikan sebagai berikut :

$$G = 1 - i \frac{\sum Pi(Qi + Qi-1)}{10.000}$$

Keterangan :

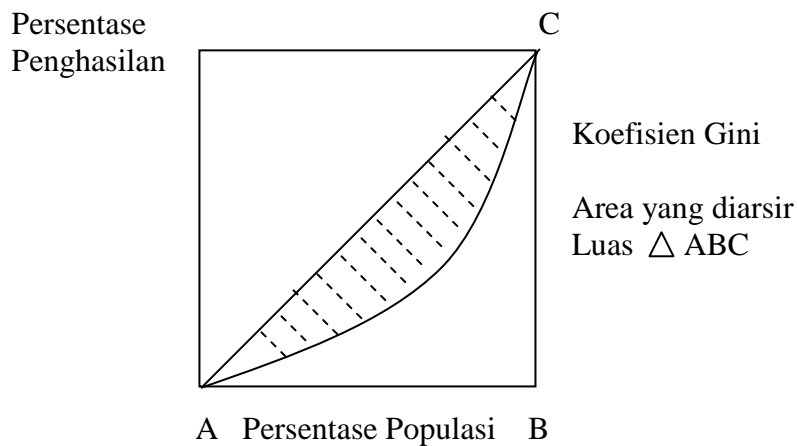
G = Koefisien Gini

P_i = Persentase penduduk

Q_i = Persentase pendapatan

Q_{i-1} = Persentase pendapatan sebelumnya

Gambar 2. Koefisien Gini



Koefisien Gini adalah persamaan ukuran ketimpangan dan bisa berbeda-beda dari nol yang mengindikasikan suatu pemerataan sempurna (*perfect equality*) sampai satu yang berarti suatu ketimpangan total (*perfect inequality*) dalam distribusi pendapatan dan pengeluaran.

Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah :

1. Lebih dari 0,5 adalah berat.
2. Antara 0,35 dan 0,5 adalah sedang.

3. Kurang dari 0,35 adalah ringan.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan perlu pula membagi penduduk dalam kelompok-kelompok sebagai berikut :

1. Kelompok penduduk dengan pendapatan tinggi yang merupakan 20% dari jumlah penduduk yang menerima pendapatan nasional/regional/PDRB.
2. Kelompok penduduk dengan pendapatan menengah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk yang menerima pendapatan nasional/regional/PDRB.
3. Kelompok penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk yang menerima pendapatan nasional/regional/PDRB.

(Emil Salim, 1984 : 20).

Tingkat kepincangan pembagian pendapatan lazimnya diukur menurut besarnya bagian pendapatan nasional atau regional yang dinikmati oleh kelompok penduduk dengan pendapatan rendah yang merupakan 40% dari jumlah penduduk yang dikenal dengan kelompok rendah 40%. Apabila kelompok rendah 40% menerima pendapatan nasional atau regional sebesar 17% atau lebih maka tingkat kepincangan pembagian pendapatan tergolong bisa dibilang rendah. Apabila terletak antara 12% sampai dengan 17% maka digolongkan dalam tingkat kepincangan pembagian pendapatan yang tinggi (Emil Salim, 1984 : 21).

3. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila tingkat kegiatan ekonominya adalah lebih tinggi dari yang dicapai sebelumnya. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi baru akan tercipta bila jumlah fisik barang-barang dan

jasa-jasa yang dihasilkan dalam perekonomian tersebut menjadi bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan dengan pendapatan nasional dari berbagai tahun. Dalam perbandingannya perlu disadari bahwa perubahan nilai pendapatan yang berlaku dari tahun ke tahun disebabkan oleh dua faktor, yaitu :

1. Perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi, dan
2. Perubahan dalam harga-harga.

Pertumbuhan ekonomi adalah merupakan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun (Sadono Sukirno, 1985 :19).

Para ahli ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan GDP, tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pada tingkat pertambahan penduduk, atau apakah berlaku atau tidaknya perubahan struktur ekonomi (Sadono Sukirno, 1985 : 14).

Simon Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi pada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan (M.L.Jhingan, 1999 : 57).

4. Teori-teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai penjelasan faktor-faktor penentu kenaikan output perkapita dalam jangka panjang serta penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya sehingga terjadi proses pertumbuhan.

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses tarik-menarik antara dua kekuatan yang dinamis, yaitu antara teknologi dengan penggunaan salah satu input tetap, sedangkan input-input yang lainnya ditambah penggunaannya, maka tambahan output yang dihasilkan dari setiap unit tambahan input variabel tersebut mula-mula menaik, akan tetapi untuk tingkat selanjutnya terjadi penurunan yang diakibatkan oleh terus bertambahnya input variabel.

Proses pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith dibedakan atas dua aspek utama, yaitu pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk.

Sedangkan Arthur Lewis mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi terjadi apabila tenaga kerja bisa dipertemukan dengan kapital. Lain halnya dengan Solow Swan yang lebih memusatkan perhatiannya kepada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi, dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Boediono, 1982 : 10-87).

5. Konsep Dasar dan Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan para ekonom klasik (Adam Smith, David Richardo, Thomas Robert Malthus dan Jhon Stuart Mill), maupun ekonom neoklasik (Robert Solow dan Trevor Swan), pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi yaitu : (1) Jumlah penduduk, (2) Jumlah stok barang modal, (3) Luas tanah dan kekayaan alam, dan (4) Tingkat teknologi yang digunakan (Sadono Sukirno, 1985 : 15).

Komponen-komponen terpenting dalam pertumbuhan ekonomi adalah :

1. Akumulasi Modal,

Termasuk investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan Sumber Daya Manusia (SDM). Akumulasi modal akan berhasil apabila sebagian pendapatan yang ada ditabung dan diinvestasikan untuk memperbesar output dan penghasilan dikemudian hari.

Pabrik-pabrik baru, mesin-mesin, peralatan dan barang-barang akan menambah persediaan modal fisik dari suatu Negara yang memungkinkan untuk mencapai tingkat output yang lebih besar. Investasi-investasi produktif secara langsung ini ditambah dengan investasi-investasi yang sering dikenal infrastruktur sosial dan ekonomi seperti air dan sanitasi, jalan-jalan, listrik, komunikasi dan lain-lain yang mempermudah dan mengintegrasikan semua kegiatan ekonomi.

Akumulasi modal dapat menambah sumber-sumber daya yang baru seperti irigasi, pestisida, pupuk dan lain-lain. Tetapi gambaran yang terpenting adalah bahwa hal ini melibatkan sasaran imbuhan konsumsi antara masa sekarang dan masa yang akan datang, artinya sekarang ini hasilnya sedikit, tetapi dalam beberapa waktu yang akan datang, hasilnya akan lebih baik.

2. Perkembangan Populasi

Meningkatnya populasi berarti mengakibatkan pertumbuhan angkatan kerja, yang pada akhirnya memerlukan lapangan kerja yang lebih luas lagi serta perlu adanya kesempatan kerja yang lebih banyak.

Perkembangan populasi yang dihubungkan dengan angkatan kerja sudah dianggap faktor yang positif dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi adalah hasil cara-cara yang baru, dan telah diperbaiki dalam melakukan pekerjaan tradisional.

Ada tiga klarifikasi pokok kemajuan teknologi, yaitu :

1. Teknologi netral.
2. Teknologi penghematan tenaga kerja.
3. Teknologi penghematan modal.

Kemajuan teknologi netral terjadi apabila telah mencapai suatu tingkat output luaran yang lebih tinggi dengan kuantitas dan kombinasi faktor masukan yang sama. Sebaliknya kemajuan teknologi bisa dikatakan dalam bentuk penghematan modal atau penghematan tenaga kerja yaitu meningkatnya output dapat dicapai dengan kuantitas input tenaga kerja atau modal yang sama (M.P.Todaro, 1993 : 145).

6. Definisi Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator makro ekonomi yang menggambarkan kinerja perekonomian wilayah dalam kurun waktu tertentu. Kinerja perekonomian wilayah tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi dengan cara mengelola sumber daya yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya.

Produk Domestik Regional Bruto adalah besarnya nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan usaha yang berada di dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun), atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang digunakan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, dan ekspor (BPS, 2002 : 1).

Dari konsep diatas, metode penghitungan PDRB dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Produksi ; PDRB merupakan selisih antara nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit usaha, dengan biaya antara lain untuk menghasilkan barang dan jasa tersebut dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).
2. Pendekatan Pendapatan ; PDRB merupakan nilai balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud dalam bentuk balas jasa tenaga kerja (upah/gaji), sewa lahan, bunga modal, dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Jika komponen balas jasa ini

ditambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung neto maka akan menjadi suatu besaran yang disebut Nilai Tambah Neto (NTN).

3. Pendekatan Pengeluaran ; PDRB merupakan penghitungan penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi. Secara makro, penggunaan akhir dari barang/jasa tersebut digunakan untuk :
 - a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.
 - b. Pengeluaran Konsumsi Lembaga Swasta yang Tidak Mencari Untung (Lembaga Nirlaba).
 - c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
 - d. Pembentukan Modal Tetap Bruto.
 - e. Perubahan Stok, dan
 - f. Ekspor Netto (Ekspor-Impor).

Jadi dengan mengetahui PDRB maka kita akan mengetahui pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

7. Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan

Di negara yang sedang berkembang seperti di Indonesia cenderung menerapkan proses industrialisasi dalam memulai pembangunan, sebab seperti yang dikatakan oleh Kuznet, strategi pembangunan itu pada dasarnya melihat pertumbuhan ekonomi sebagai suatu proses transformasi struktur ekonomi dengan titik berat di sektor pertanian menuju ke penekanan struktur industri. Tanpa adanya industrialisasi, sulit diharapkan adanya suatu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (*sustained economic growth*). Dalam hal ini, transformasi struktur

dikehendaki karena dipandang sektor pertanian tidak memiliki *value added* yang tinggi serta *term of trade* yang rendah (A.Erani Yustika, 2002 : 45)..

Persoalan akan muncul pada titik disepakatinya sektor industri sebagai basis pertumbuhan ekonomi dengan mengabaikan sektor lainnya. Dalam konteks ini sektor industri didinamisir untuk memproduksi secara efisien dan produktif sehingga bisa menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, sektor-sektor lainnya (karena relatif diabaikan) tetap dalam kondisi stagnan.

Keyakinan bahwa bidang industri merupakan sektor yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi dalam banyak hal bisa dipahami, tapi dalam dosis tertentu bisa juga dianggap berlebihan. Dipahami dalam pengertian bahwa sektor industri selalu memproduksi barang dan jasa setelah melalui proses pengolahan (*manufacturing*) sehingga bisa meingkatkan nilai produk dan menjadi sumber pendapatan, baik pendapatan nasional maupun daerah. Tapi bisa juga dianggap berlebihan jika sektor industri tersebut dapat tumbuh tanpa adanya dukungan dari sektor-sektor lainnya, khususnya bagi negara atau daerah yang memiliki *endowment factor* di sektor pertanian.

Akibat dukungan pemerintah terhadap sektor industri yang berlebihan, muncul perbedaan efisiensi dan produktivitas antara sektor industri dan sektor lainnya (misalnya sektor pertanian) sehingga menyebabkan terjadinya ketimpangan sektoral, yang dalam penilaian mikro sekaligus juga menunjukkan ketimpangan pendapatan antara pelaku ekonomi yang bekerja di sektor industri dan pelaku ekonomi yang bekerja di sektor pertanian (Lecaillon,*et al.*, 1984 : 18-19).

Sekumpulan teori menyatakan bahwa pemerataan yang sangat timpang terjadi pada saat mengubah pertumbuhan ekonomi dalam waktu yang cepat (M.P.Todaro, 1983 : 212).

Simon Kuznet merupakan orang yang sangat dihargai atas kepeloporannya mengenai pola-pola pertumbuhan di Negara-negara maju. Beliau mengemukakan bahwa dalam tingkat permulaan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan akan cenderung jelek kemudian dalam tingkat selanjutnya akan cenderung lebih baik (M.P.Todaro, 1983 : 208).

Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan merupakan hal yang sering menjadi permasalahan di Negara-negara yang sedang berkembang, karena Negara-negara tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi pemerataan pendapatannya sering kali diabaikan sehingga terjadi ketimpangan pendapatan diantara lapisan masyarakat.

Pertumbuhan yang tinggi sangatlah diperlukan pada era pembangunan, terutama pembangunan ekonomi. Akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya juga dapat memperkecil tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam masyarakat sehingga jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin semakin mengecil. Atau dengan kata lain, bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dapat memperingan tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

Ada dua argumentasi yang merupakan penyebab terjadinya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, yaitu :

1. Menurut asumsi Lewis, tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja di sektor modern sebanding dengan tingkat akumulasi modal

sektor tersebut. Padahal, dalam realitasnya, karena kemajuan teknologi, kebanyakan keuntungan para kapitalis diinvestasikan kembali pada barang-barang modal yang canggih dan hemat tenaga kerja, dan bukan pada barang kapital yang *labor oriented*.

2. Persoalan keterampilan (*skill*) tenaga kerja. Pada kenyataannya, tingkat penguasaan keterampilan tinggi yang disyaratkan oleh sektor modern tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja di sektor tradisional (pertanian). Faktor ini semakin memperkecil pengalihan dan penyerapan tenaga kerja ke sektor industri. Dengan argumentasi seperti itu maka muncullah apa yang dikenal sebagai “pertumbuhan tanpa pemerataan” (*growth without equality*). Semua tambahan pendapatan dan pertumbuhan output dibagikan kepada sekelompok kecil pemilik modal dalam jumlah besar, sedangkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja dari sebagian besar tenaga kerja tetap tidak berubah, bahkan cenderung memburuk. Dengan begitu, hipotesa “U” terbalik yang dikemukakan oleh Kuznet, di mana pada tahap awal pertumbuhan ekonomi distribusi pendapatan cenderung memburuk, sedangkan pada tahap selanjutnya akan membaik, dalam perjalanannya di daerah-daerah tertentu tidak lagi teruji kredibilitasnya. Sebab, realitasnya ketimpangan pendapatan tersebut tidak menunjukkan perubahan yang berarti walaupun pendapatan semakin meningkat.

Dengan kondisi seperti yang diuraikan di atas, menunjukkan bahwa dalam penanganan masalah ketimpangan pendapatan tidak cukup hanya bicara mengenai subsidi modal terhadap kelompok miskin maupun peningkatan pendidikan (keterampilan) tenaga kerja. Lebih penting dari itu, persoalan yang terjadi

sesungguhnya adalah akibat dari kebijakan pembangunan ekonomi yang bersifat struktural. Maksudnya, kebijakan masa lalu yang begitu menyokong sektor industri dengan mengorbankan sektor lainnya patut untuk direvisi karena telah mendorong munculnya ketimpangan sektoral yang berujung pada ketimpangan pendapatan.